

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S. A. (2011). *Transportasi dan pengembangan wilayah: Graha Ilmu*.
- Afryansyah, R. D., & Haryanto, H. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Agresti, A. (2002). Logistic regression. *Categorical data analysis*.
- Bonsón Ponte, E., & Escobar Rodríguez, T. (2002). A survey on voluntary disclosure on the internet: empirical evidence from 300 European Union companies.
- Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of management journal*, 34(3), 555-590.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 tentang penyajian laporan keuangan, tujuan spesifik pelaporan keuangan pemerintah.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.52/1797/SJ 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) BPK RI.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kemenkeu.
- PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Pemerintah / PP Nomor 56/2005 (Republik Indonesia, 2005b) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
- Peraturan pemerintah / PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1).
- Heriningsih, S., & Marita, M. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 67-78.
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression*, John Wiley & Sons. *New York*.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.

- hopoKusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. *Accounting analysis journal*, 1(1), 27-35.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101-121.
- Lee, C.-W. J., Liu, C., & Wang, T. (1999). The 150-hour rule. *Journal of accounting and economics*, 27(2), 203-228.
- Lubis, A. T. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia.
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Ningsih, R. F. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 89-104.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. *Universitas Indonesia*.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis pengaruh tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik pemda, dan karakteristik demografi terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 24-27.
- Rahman, M. G. (2000). Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik). *Jakarta: Komnas HAM*.
- Rahmawati, R. A., & Mahmudi, A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Accounting analysis journal*, 5(2), 122-130.
- Sekaran, U. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Jakarta.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. (2017). Jakarta.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of US municipalities on the Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56.
- Sugiyono, P. (2013). *Statistik untuk Penelitian*. CV. Alfabeta Bandung.
- Suhardjanto, D. Yulianingtyas. RR 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1).

- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit quality: A synthesis of theory and empirical evidence. *Journal of accounting literature*, 23, 153.
- West, D. M. (2005). *Digital government: Technology and public sector performance*: Princeton University Press.
- <https://www.kupastuntas.co/2019/11/10/kpk-beberkan-25-provinsi-terkorup-lampung-urutan-nomor-berapa-ya>